



# Khoirudin Kejar Pembahasan APBD 2025

## Gambir, Warta Kota

Pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta telah disahkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di gedung Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (4/10/2024) lalu.

Sementara alat kelengkapan dewan (AKD) seperti struktur Komisi A sampai E, Badan Kehormatan (BK), Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Musyawarah (Bamus) baru akan dibahas pada Senin (7/10/2024) siang.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin optimistis, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2025 akan tepat waktu.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, eksekutif dan legislatif harus

menyetujui rancangan Perda APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

"APBD murni (2025) terakhir paling telat tanggal 30 November 2024. Kami akan selesaikan di pertengahan November," kata Khoirudin pada Senin (7/10/2024).

Khoirudin mengaku, belum bisa memastikan apakah rapat pembahasan anggaran itu bakal dibahas di gedung DPRD DKI Jakarta atau kawasan puncak, Jawa Barat seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dia menyebut, keputusan itu akan diambil lewat rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta.

"Soal itu masih kami rapatkan nanti dalam rapat musyawarah," imbuh Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.

Menurutnya, masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama DPRD DKI

Jakarta. Salah satu program prioritas adalah pendidikan di sekolah swasta gratis, sebagaimana rekomendasi koleganya di Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu.

"Pertama tentang pendidikan, kami ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan oleh warga Jakarta, terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri. Dengan zonasi yang ada, banyak warga yang tidak tercover zonasi karena tidak ada sekolah," katanya.

"Inshaallah nanti kami bersama-sama, tentu saya dan kami DPRD punya hak budget dan pengawasan. Kami sudah lakukan kajian dan sudah presentasi di Dinas Pendidikan untuk menerima semua siswa Jakarta bersekolah negeri dan swasta, itu gratis," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Khoirudin juga tak bisa memastikan apakah rencana

sekolah gratis ini akan menghapus program KJP Plus yang selama ini ada.

Diketahui, isu pengalihan anggaran KJP Plus ke sekolah gratis sempat mencuat di kalangan dewan.

"KJP, kami masih kaji dulu. Yang jelas, yang terbaik buat warga Jakarta, akan kami berikan," pungkasnya.

## Bentuk AKD

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan, agenda pertama yang akan dikerjakan sebagai pimpinan yakni membentuk AKD.

Kata dia, AKD harus secepatnya dibentuk mengingat banyak persoalan dan evaluasi kinerja Pemprov DKI terkait target di pengujung tahun.

"Yang pasti pimpinan DPRD sudah terbentuk, kita akan bekerja, bertugas

menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan dewan, komisi, dan badan-badan di DPRD," kata Rany.

Dengan begitu, pimpinan juga bisa secepatnya mengagendakan rapat pembahasan APBD murni tahun anggaran 2025 di masing-masing komisi.

Pembahasan ini akan dilakukan bersama eksekutif di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lewat Badan Anggaran (Banggar) maupun penajaman di komisi A sampai E.

"Selanjutnya kami akan segera mengagendakan giat-giat untuk anggota DPRD DKI Jakarta, misalnya ada pembahasan APBD 2025, pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), belum lagi ada kunjungan kerja, sosialisasi dan lainnya. Kami akan berkolaborasi," jelas Rany. (faf)